

UJIAN AKHIR SEMESTER

MATA KULIAH EKONOMI PENDIDIKAN

DOSEN PENGAMPU: DR. PUJIATI, M.PD., DR. MEYTA PRITANDARI, M.PD., FANNI RAHMAWATI, M.PD.

Nama : Dia Ravikasari

NPM : 2313031067

Kelas : 2023C

PETUNJUK: Kerjakan soal berikut dengan benar.

Soal 1 – Efisiensi Anggaran

Pendidikan Kasus

Pemerintah Kabupaten A mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 30% dari APBD. Sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan gedung sekolah baru, sedangkan pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pengadaan media pembelajaran digital masih sangat terbatas. Setelah lima tahun, angka partisipasi sekolah meningkat, tetapi kualitas hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan signifikan.

Pertanyaan:

1. Analisis penggunaan anggaran pendidikan pada kasus tersebut berdasarkan konsep efisiensi internal dan eksternal pendidikan.
2. Jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas sumber daya manusia. Berikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Jawaban:

1. Efisiensi internal berkaitan dengan seberapa baik sumber daya pendidikan digunakan untuk menghasilkan output pendidikan, seperti prestasi belajar, kelulusan, dan kompetensi siswa. Pada kasus ini, pemerintah justru lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung sekolah baru, daripada mengalokasikan dana untuk mengadakan pelatihan guru, pengembangan kurikulum dan pengadaan media pembelajaran, yang membuat angka partisipasi sekolah meningkat, tetapi kualitas hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi internal belum tercapai secara optimal. Peningkatan akses pendidikan memang berhasil dilakukan, tetapi proses pembelajaran belum didukung oleh kualitas guru, kurikulum, dan media pembelajaran yang memadai. Akibatnya, investasi yang

besar pada sarana fisik belum mampu menghasilkan peningkatan mutu pendidikan.

Efisiensi eksternal berkaitan dengan manfaat pendidikan bagi masyarakat dan dunia kerja. Pendidikan dikatakan efisien secara eksternal apabila lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pasar kerja. Dalam kasus ini, rendahnya perhatian terhadap pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan media pembelajaran digital dapat menyebabkan kompetensi siswa tidak berkembang secara optimal. Akibatnya, lulusan mungkin kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan di era modern sehingga manfaat pendidikan bagi pembangunan ekonomi dan sosial menjadi kurang maksimal. Dengan demikian, efisiensi eksternal juga belum tercapai dengan baik.

2. Kebijakan yang terlalu berfokus pada pembangunan fisik sekolah memiliki beberapa dampak, yaitu:

- Akses pendidikan meningkat karena tersedianya lebih banyak sekolah.
- Kualitas pembelajaran cenderung stuck atau bahkan menurun karena kompetensi guru tidak banyak berkembang.
- Kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan literasi digital siswa kurang berkembang.
- Lulusan berpotensi kurang siap menghadapi persaingan dunia kerja dan perkembangan teknologi.
- Produktivitas serta daya saing SDM daerah menjadi kurang optimal.

Rekomendasi kebijakan yang lebih efektif:

- Menyeimbangkan alokasi anggaran antara pembangunan fisik dan peningkatan mutu pendidikan.
- Meningkatkan program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan.
- Mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan abad ke-21 dan perkembangan teknologi.
- Memperluas penggunaan media pembelajaran digital dan teknologi pendidikan.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap hasil belajar siswa untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
- Mengutamakan program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran, bukan hanya pada pembangunan sarana fisik.

Soal 2 – Ketimpangan Akses Pendidikan

Kasus

Sekolah di wilayah perkotaan memiliki laboratorium lengkap, akses internet cepat, dan guru profesional. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan mengalami kekurangan guru, fasilitas minim, dan keterbatasan teknologi. Akibatnya, hasil ujian siswa di desa jauh lebih rendah dibandingkan siswa di kota.

Pertanyaan

1. Jelaskan bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut.
2. Analisis dampak ekonomi jangka panjang dari ketimpangan pendidikan. Usulkan solusi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Jawaban

1. Kasus tersebut menunjukkan adanya ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekolah di perkotaan memiliki fasilitas yang lebih lengkap, seperti laboratorium, internet cepat, dan guru yang profesional. Sebaliknya, sekolah di pedesaan mengalami kekurangan guru, sarana belajar yang terbatas, serta akses teknologi yang rendah. Ketimpangan ini menyebabkan kesempatan siswa untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas menjadi tidak merata. Akibatnya, siswa di desa memiliki hasil belajar dan prestasi akademik yang lebih rendah dibandingkan siswa di kota.
2. Dampak ekonomi jangka panjang
 - Kualitas sumber daya manusia di daerah pedesaan menjadi lebih rendah.
 - Kesempatan memperoleh pekerjaan yang baik menjadi lebih terbatas.
 - Tingkat pendapatan masyarakat desa cenderung lebih rendah dibandingkan masyarakat kota.
 - Kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan semakin besar.
 - Produktivitas tenaga kerja nasional dapat menurun karena tidak semua masyarakat memperoleh pendidikan yang berkualitas.
 - Kemiskinan dapat terus berlanjut ke generasi berikutnya.

Solusi kebijakan:

- Pemerintah perlu melakukan pemerataan fasilitas pendidikan, seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet di daerah pedesaan.
- Memberikan insentif khusus bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil.
- Memanfaatkan teknologi pembelajaran digital untuk menjangkau sekolah yang sulit diakses.
- Meningkatkan anggaran pendidikan untuk daerah yang masih tertinggal.
- Menyelenggarakan pelatihan guru secara berkala agar kualitas pengajaran lebih merata.
- Membangun kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat untuk mendukung pengembangan pendidikan di daerah pedesaan.

Soal 3 – Pengangguran Terdidik

Kasus

Jumlah lulusan perguruan tinggi di Kota B meningkat setiap tahun. Namun, banyak lulusan menganggur atau bekerja tidak sesuai bidang studinya. Dunia industri menilai kompetensi lulusan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pertanyaan

1. Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori human capital.
2. Jelaskan hubungan antara pendidikan dan pasar kerja pada kasus tersebut. Berikan rekomendasi untuk meningkatkan relevansi lulusan.

Jawaban

1. Menurut teori human capital, pendidikan merupakan investasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas seseorang sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Namun, pada kasus ini terjadi pengangguran terdidik karena kompetensi lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Beberapa penyebabnya adalah:
 - Kurikulum perguruan tinggi belum menyesuaikan perkembangan kebutuhan industri.

- Lulusan lebih banyak memiliki pengetahuan teoritis daripada keterampilan praktis.
- Kurangnya pengalaman kerja, magang, dan pelatihan yang relevan.
- Perkembangan teknologi dan industri lebih cepat dibandingkan penyesuaian sistem pendidikan.
- Jumlah lulusan yang terus meningkat tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.

Akibatnya, investasi pendidikan yang telah dilakukan belum menghasilkan produktivitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

2. Pendidikan berfungsi menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja. Pada kasus ini terjadi *mismatch* (ketidaksesuaian) antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Akibatnya, banyak lulusan yang menganggur atau bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan dunia kerja belum berjalan secara efektif. Berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan relevansi lulusan.

- Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.
- Memperbanyak program magang, praktik kerja, dan kerja sama dengan perusahaan.
- Meningkatkan pelatihan keterampilan (*soft skills* dan *hard skills*) yang dibutuhkan dunia kerja.
- Mengembangkan program sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa.
- Memperkuat layanan bimbingan karier dan informasi pasar kerja di perguruan tinggi.
- Mendorong pengembangan kewirausahaan agar lulusan tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja.

Soal 4 – Kenaikan Biaya Pendidikan

Kasus

Sebuah universitas swasta menaikkan uang kuliah sebesar 25% untuk meningkatkan fasilitas kampus dan layanan akademik. Kebijakan tersebut mendapat protes dari mahasiswa karena dinilai memberatkan keluarga berpenghasilan rendah.

Pertanyaan

1. Analisis kasus tersebut berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat.
2. Jelaskan dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan.
3. Apakah pemerintah perlu melakukan intervensi? Jelaskan alasannya.

Jawaban

1. Pendidikan dapat dipandang sebagai barang publik karena memberikan manfaat bagi masyarakat luas, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, setiap warga negara seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Di sisi lain, pendidikan juga merupakan barang privat karena individu yang menempuh pendidikan akan memperoleh manfaat pribadi, seperti peluang kerja yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Karena adanya manfaat pribadi tersebut, peserta didik biasanya harus menanggung sebagian biaya pendidikan. Dalam kasus ini, universitas menaikkan biaya kuliah untuk meningkatkan fasilitas dan layanan akademik. Dari sudut pandang barang privat, kebijakan tersebut dapat dibenarkan karena mahasiswa akan memperoleh manfaat langsung dari peningkatan kualitas layanan. Namun, dari sudut pandang barang publik, kenaikan biaya yang terlalu tinggi dapat mengurangi akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pendidikan tinggi.
2. Beberapa dampak sosial ekonomi yang dapat terjadi adalah:
 - Mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah berisiko kesulitan melanjutkan pendidikan.
 - Meningkatnya kesenjangan akses pendidikan antara kelompok kaya dan miskin.
 - Bertambahnya beban ekonomi keluarga untuk membiayai pendidikan.
 - Potensi meningkatnya angka putus kuliah bagi mahasiswa yang tidak mampu

membayar biaya pendidikan.

- Dalam jangka panjang, kualitas sumber daya manusia dapat terhambat karena tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi.

3. Ya, pemerintah perlu melakukan intervensi. Hal ini karena pendidikan memiliki fungsi strategis dalam pembangunan nasional dan tidak boleh hanya dinikmati oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi. Intervensi pemerintah dapat dilakukan melalui:

- Pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu.
- Bantuan biaya pendidikan atau subsidi pendidikan tinggi.
- Program pinjaman pendidikan dengan bunga rendah.
- Pengawasan terhadap kebijakan kenaikan biaya pendidikan agar tetap wajar dan tidak memberatkan masyarakat.

Soal 5 – Digitalisasi

Pembelajaran Kasus

Pasca pandemi, sekolah menerapkan pembelajaran berbasis digital. Namun, siswa dari keluarga kurang mampu mengalami kesulitan membeli perangkat dan kuota internet sehingga partisipasi belajar menurun.

Pertanyaan

1. Analisis masalah tersebut menggunakan konsep biaya pendidikan dan *opportunity cost*.
2. Jelaskan dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan. Berikan solusi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Jawaban

1. Kasus tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pembelajaran menimbulkan biaya pendidikan tambahan bagi siswa, seperti biaya membeli HP atau laptop dan kuota internet. Bagi keluarga yang kurang mampu, biaya ini menjadi beban yang cukup besar sehingga menghambat akses mereka terhadap pembelajaran.

Dari sisi *opportunity cost* (biaya peluang), keluarga harus mengorbankan kebutuhan lain yang dianggap penting, seperti kebutuhan pangan, kesehatan, atau kebutuhan rumah tangga, untuk membeli perangkat dan kuota internet. Karena keterbatasan

ekonomi, sebagian siswa akhirnya tidak dapat mengikuti pembelajaran secara optimal atau bahkan memilih untuk mengurangi partisipasi belajar.

2. Dampak Kesenjangan Digital:

- Tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pembelajaran.
- Prestasi belajar siswa dari keluarga kurang mampu cenderung menurun.
- Terjadi kesenjangan hasil belajar antara siswa yang memiliki fasilitas digital lengkap dan yang tidak.
- Kualitas pendidikan menjadi tidak merata.
- Risiko meningkatnya angka putus sekolah dan rendahnya kompetensi digital siswa.

Solusi Kebijakan:

- Pemerintah memberikan bantuan perangkat belajar seperti laptop atau tablet bagi siswa kurang mampu.
- Menyediakan subsidi atau bantuan kuota internet untuk peserta didik.
- Memperluas jaringan internet hingga ke daerah terpencil.
- Menyediakan fasilitas internet gratis di sekolah, perpustakaan, atau pusat belajar masyarakat.
- Mengembangkan metode pembelajaran campuran (*blended learning*) agar siswa tetap dapat belajar meskipun memiliki keterbatasan akses internet.